

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang Masalah**

Jepang dan Korea Selatan merupakan dua negara yang terletak di Asia Timur. Berdasarkan lingkungan geografis, selain dua negara ini, negara lain yang berada di kawasan Asia Timur adalah Cina dan Korea Utara. Dalam perkembangannya, berbagai permasalahan terjadi di Asia Timur, baik yang merupakan masalah menyangkut masa lalu maupun persoalan politik yang baru muncul, mengandung banyak persoalan yang bersifat sensitif yang dapat berkembang dan menjadi gangguan terhadap stabilitas kawasan Asia Timur.

Salah satu persoalan yang muncul di Asia Timur adalah persoalan antara Jepang dan Korea Selatan yang membuat hubungan diplomatik diantara kedua negara masih belum benar-benar membaik. Permasalahan antara Jepang dan Korea Selatan bukanlah permasalahan politik yang baru muncul, permasalahan ini muncul sejak tahun 1500-an di saat Jepang ingin menguasai Semenanjung Korea untuk memperluas wilayahnya (Beasley, 1991). Selain itu konflik semakin memanas dikarenakan Jepang pernah menjajah Korea Selatan selamakurun waktu 35 tahun, yakni dari tahun 1910 sampai tahun 1945. Hal ini diperparah dengan adanya kunjungan Perdana Menteri Jepang pada waktu itu, Junichiro Koizumi ke Kuil Yasukuni. Kunjungan itu membuat rakyat Korea Selatan memanas. Kuil Yakusuni yang berarti “negeri yang damai” itu memang menyimpan luka lama. Didalam kuil yang dibangun tahun 1869 itu dimakamkan sekitar 2,5 juta orang Jepang yang tewas selama perang. Mereka terdiri atas perawat, prajurit, dan pelajar yang maju ke medan perang.

Bagi sebagian besar rakyat Jepang, mereka yang dikuburkan di kuil itu adalah pahlawan sehingga patut didoakan dan dihormati. Namun, bagi rakyat Korea Selatan, Kuil Yasukuni dipandang tak lebih sebagai simbol kekejaman Jepang pada masa perang. Pasalnya, di kuil itu dimakamkan juga penjahat kelas A masa perang, seperti Perdana Menteri Jendral Hideki Tojo yang bertanggung jawab atas kekejaman Jepang selama perang dunia II. Karena itu, kunjungan para pejabat Jepang, termasuk Koizumi seakan membangkitkan luka lama dan kenangan pahit Bangsa Korea Selatan.

Hal itu seakan menggambarkan kembali bagaimana kebengisan masa kolonialisme Jepang di Korea, terlebih mengingatkan Korea Selatan akan peristiwa pergerakan 1 maret 1919 dimana sekitar 2 juta Masyarakat Korea terlibat didalamnya. Terlebih lagi ratusan ribu perempuan Korea yang dinistakan sebagai budak seks tentara Jepang sejak tahun 1932, dan sebagian dari mereka dibunuh. Mereka menganggap kunjungan tersebut sebagai simbol tidak adanya penyesalan Pemerintah Jepang atas kekejaman yang dilakukan oleh militernya di masa lalu.

Hubungan bilateral Jepang dan Korea Selatan yang secara perlahan membaik, walaupun keduanya masih memiliki permasalahan mengenai distorsi sejarah yang sampai sekarang sulit untuk diselesaikan, salah satunya adalah distorsi sejarah yang dilakukan oleh Jepang, yaitu mengenai imperialisme Jepang yang didalamnya saratakan kekejaman namun seakandiubah menjadi sesuatu yang indah (memungkirkan holocaust yang dibuatnya kala itu), permasalahan *jughun ianfu* (wanita dari wilayah jajahan Jepang yang dijadikan pemuas seks tentara Jepang) dan yang paling kerap naik kepermukaan adalah mengenai perebutan kepemilikan atas pulau Dokdo (bagi Korea Selatan) dan Takeshima (bagi Jepang). (Barber, 2009)

Pada kenyataannya sebagian besar masyarakat Korea masih menaruh dendam terhadap pendudukan Jepang, dan sikap nasionalisme masyarakat Korea cenderung didominasi oleh sikap anti-Jepang. Bahkan meskipun pasca perang Jepang telah berusaha untuk meningkatkan kerjasama bilateral, kebencian rakyat Korea Selatan kepada Jepang yang semakin diperburuk oleh perselisihan masalah sejarah, telah menjadi batu sandungan utama dalam hubungan bilateral kedua negara. Menurut Presiden Kim Dae-jung, inisiatif pemulihan hubungan diperlukan tekad dan pragmatisme terhadap sikap anti-Jepang masyarakat Korea Selatan. Selanjutnya Presiden Kim menyatakan bahwa kerjasama dalam berbagi bidang antara dua negara maju tidak boleh terhalang oleh emosi dari masa lalu. (Sheen, 2003)

Pada tanggal 25 April 2006, Presiden Korea Selatan saat itu, Roh Moo-hyun, meminta Jepang untuk minta maaf atas kolonialisasi yang dilakukan oleh pemerintahan Jepang pada waktu itu kepada Korea Selatan secara keseluruhan. Upaya demi upaya telah dilakukan oleh pemimpin kedua negara. Akan tetapi, kebencian dari penduduk Korea Selatan tetap tertanam sehingga upaya perbaikan hubungan kedua negara sulit untuk menemui titik temu. Namun angin segar mulai terasa ketika Park Geun Hye terpilih sebagai presiden ke 11 Korea Selatan. Berbeda dengan kebijakan luar negeri beberapa presiden Korea Selatan sebelumnya, Presiden Park Geun Hye menerapkan kebijakan luar negeri baru yang ia sebut dengan *Trustpolitik Policy*. *Grand strategy* pada masa kepemimpinan Park Geun Hye ini memiliki tiga pilar, yaitu kebijakan pertahanan dan keamanan yang kuat, memastikan pelaksanaan *trust diplomacy*, dan membangun rasa saling percayadalam menyelesaikan konflik di semenanjung Korea. Pemerintahan Park Geun Hye menargetkan tiga wilayah geografis yaitu Semenanjung Korea, Asia Timur Laut, dan Eurasia.

Secara umum kebijakan politik luar negeri Korea Selatan pada masa pemerintahan Presiden Park adalah membangun hubungan dengan menumbuhkan kepercayaan antar negara. Selanjutnya kebijakan politik luar negeri Korea Selatan terhadap Jepang menjadi kebijakan politik luar negeri Korea Selatan yang cukup istimewa karena hubungan bilateral Jepang dan Korea Selatan yang selalu mengalami pasang surut yang disebabkan isu sejarah masa lalu. Jelas bahwa imperialisme yang dilakukan oleh Jepang meninggalkan trauma mendalam untuk Korea Selatan. Meskipun Presiden Park Geun Hye berupaya untuk menyelesaikan isu sejarah imperialisme Jepang dimasa lalu, Presiden Park Geun Hye menghadapi permintaan tinggi dari dalam negeri untuk meningkatkan hubungan kerjasama ekonomi dengan Jepang yang bertujuan untuk mengurangi ketegangan hubungan diplomatik kedua negara. Serta mengurangi ketegangan antara Jepang dan Cina yang sejalan dengan penguatan hubungan dengan Jepang dan Amerika Serikat. Sementara beberapa diplomat Korea Selatan secara terbuka mengusulkan *two track diplomacy* terhadap Jepang, menjadikan hal tersebut sebagai pertamakalinya Presiden Park menyetujui gagasan tersebut di forum senior aides. (Kyodo, 2015)

Tepatnya 2 November 2015, Perdana Menteri Shinzo Abe dan Presiden Park Geun Hye bertemu dalam *official summit meeting* pertama mereka, banyak pihak yang menyadari bahwa arah politik antara Jepang dan Korea Selatan, yang merupakan dua sekutu Amerika yang paling penting di Asia Timur, merusak kemampuan mereka untuk bekerja sama dan memimpin secara efektif di wilayah tersebut. Dalam *official summit meeting* tersebut kedua pemimpin sepakat untuk menyelesaikan persoalan wanita penghibur (Jugun Ianfu) yang dijelaskan oleh Presiden Park sebagai "batu sandungan terbesar" untuk hubungan bilateral yang ramah antara Jepang dan Korea Selatan. Perdana Menteri Shinzo Abe mengatakan bahwa Jepang dan Korea Selatan telah sepakat untuk mempercepat

pembicaraan tentang persoalan wanita penghibur pada masa perang tetapi menambahkan bahwa ia ingin hubungan bilateral menjadi berorientasi masa depan.

Pada kenyataannya Jepang dan Korea Selatan banyak dipertimbangkan sebagai partner ideal karena kedua negara melakukan *shared values, geostrategic interests and outlook*, hingga *geography*, serta fakta bahwa kedua negara merupakan aliansi Amerika Serikat di Asia Timur. Selain kesepakatan mengenai masalah wanita penghibur, kesepakatan mengenai isu keamanan antara kedua negara dapat tercapai pada masa kepemimpinan Abe dan Park. Berkaitan dengan *security agreement*, Jepang dan Korea Selatan memiliki *General Security of Military Information Agreement* (GSOMIA) yang merupakan sebuah kesepakatan rutin yang menetapkan bentuk *military information sharing* yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat setelah kesepakatan tersebut disetujui (Brad, 2016).

## 2. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang dipaparkan dalam latar belakang, maka terdapat pokok permasalahan yang penulis ambil yaitu **Mengapa Jepang - Korea Selatan memperbaiki hubungan luar negerinya pada tahun 2015?**

## 3. Kerangka Pemikiran

Ruang lingkup Hubungan internasional sangat luas, meliputi komponen hukum, ekonomi, militer, sosial, budaya, sehingga tentu akan mencakup kepentingan (*interest*) dan tindakan (*action*) beberapa atau semua negara serta proses interaksi antar negara. Adanya kepentingan dan tindakan dari suatu negara di dalam percaturan dunia internasional tentu akan berdampak pada keadaan negara

lain, terutama negara yang berada dalam satu wilayah regionalnya. Untuk melakukan analisis terhadap faktor pendorong membaiknya hubungan luar negeri Jepang – Korea Selatan pada tahun 2015, penulis menggunakan **Teori Kepentingan Nasional dan Teori Aliansi** dalam proses perumusan kebijakan luar negeri kedua negara tersebut.

## Teori Kepentingan Nasional

Setiap negara memiliki kepentingan serta tujuan nasional yang ingin dicapai dengan melakukan interaksi dengan negara ataupun aktor lain dalam politik internasional. **Teori kepentingan nasional** salah satunya dikembangkan oleh Daniel S. Papp. Dalam teorinya, Papp mengatakan bahwa dalam *national interest* terdapat beberapa aspek, seperti ekonomi, ideologi, kekuatan dan keamanan militer, moralitas dan legalitas(Papp, 1988). Kepentingan nasional ini sering disebut sebagai konsepsi umum yang menjadi unsur vital bagi negara karena menjadi tujuan mendasar bagi suatu negara serta faktor yang paling menentukan bagi para pembuat keputusan dalam merumuskan dalam politik luar negeri adalah inti dari kepentingan nasional.

Selain Papp, Aleksius Jemadu berpendapat bahwa kepentingan nasional dapat juga diartikan sebagai kepentingan negara untuk melindungi teritorial dan kedaulatan negaranya. Jika menggunakan pendekatan realisme, kepentingan nasional dapat diartikan sebagai kepentingan negara sebagai *unitary actor* yang penekanannya pada peningkatan national power (kekuasaan nasional) untuk mempertahankan keamanan nasional dan survival dari negara tersebut(Jemadu, 2008).

Menurut Papp, sasaran dari kepentingan nasional meliputi beberapa hal, diantaranya: mempertahankan diri atau usaha untuk menjaga kesatuan negara, manusia

(warganya), wilayah teritorial, keamanan, kesejahteraan (kesehatan), gengsi (status), kekuasaan, promosi (perlindungan ideologi, dan lain sebagainya). Dan bentuk yg sudah diciptakan oleh para pembuat keputusan negara yg dianggap umum, berjangka panjang, dan memiliki tujuan tertentu dimana negara, bangsa dan pemerintah menganggap semua ini sebagai fungsi pelayanan.

Dalam prakteknya, dengan menggunakan teori ini sebagai landasan dalam merumuskan kebijakan luar negerinya, kebijakan yang diambil oleh kedua pemerintah negara, baik Jepang maupun Korea Selatan sangat jelas terlihat bahwa mereka memiliki beberapa kepentingan untuk mendapatkan beberapa tujuan seperti kekuatan dan keamanan militer di wilayah mereka. Membaiknya hubungan kedua negara ditempuh dengan menyampingkan beberapa hambatan dari sejarah hubungan kedua negara tersebut, dengan tujuan agar warga negara dari kedua negara tidak terancam keselamatannya, serta wilayah teritorial mereka tidak terancam oleh peluncuran rudal Korea Utara.

## **Teori Aliansi**

Selain teori kepentingan nasional, Teori Aliansi juga dapat digunakan untuk memahami perilaku antara kedua negara tersebut. Aliansi merupakan salah satu pola kekuasaan dimana negara berusaha mempertahankan kelangsungan hidup serta menciptakan peluang untuk memajukan kepentingan nasionalnya dengan menyatukan power yang dimiliki terhadap satu atau lebih negara lain yang memiliki kepentingan serupa.

Stephen M. Waltz menjelaskan bahwa negara akan cenderung menciptakan sebuah aliansi dengan kekuatan negara lain, dari pada harus melawan sumber ancaman

dengan kekuatan sendiri. Walt berusaha untuk memahami bagaimana negara memilih dengan siapa dia bealiansi. Pilihan negara untuk melakukan aliansi biasanya berdasar pada tujuan yang mendasari keputusan tersebut, apakah *Balancing* atau *Bandwagoning*, yang biasanya bergantung pada pertimbangan *power*. Terdapat dua alasan mengapa negara melakukan *balance*, pertama untuk menghentikan kekuatan yang dimiliki negara hegemon sebelum negara tersebut memperoleh lebih banyak lagi *power*, kedua, bergabung dengan negara lain akan memungkinkan negara tersebut memiliki lebih banyak *power* dalam aliansi tersebut. Sedangkan pilihan *bandwagon* justru mengurangi atau bahkan tidak menjamin keamanan negara, karena kekuatan yang dimiliki oleh negara hegemon akan secara langsung mengintervensi kebijakan luar negeri negara yang lemah (Waltz, 1985)

Menurut Waltz, perilaku negara dalam politik internasional cenderung dipengaruhi oleh adanya struktur internasional yang bersifat anarkis, yang menjadi arena bagi percaturan politik internasional. Memperkuat argumen Waltz, menurut Organski (Organski, 1958), sistem internasional yang ada bersifat hirarkis, dimana yang berada dipuncak sistem ini adalah *dominant power*, lalu dibawahnya adalah *great powers*, diikuti *middle powers*, dan yang paling akhir adalah *small powers*. Berpegang pada sistem tersebut, Organski berpendapat bahwa perdamaian dan kestabilan internasional dapat terjadi jika *dominant power* didalam perpolitikan internasional mampu mempertahankan dominasinya dan mengatur hukum dan tata tertib internasional, dengan cara mengimplementasikan *power* yang ia miliki didalam sistem internasional, terlepas dari batas wilayah yang dimiliki oleh *dominant power* tersebut. Untuk mencapai tujuan tersebut, *dominant power* dapat melakukan hubungan dengan negara-negara dengan kekuatan yang lebih kecil dari yang ia miliki, salah satunya dengan menggabungkan *power* yang mereka miliki, seperti melakukan aliansi.



Selain Waltz, Plano & Olton juga mencoba menjelaskan mengenai hal yang mendorong sebuah negara melakukan aliansi. Dalam bukunya yang berjudul *Kamus Hubungan Internasional*, Plano & Olton menjabarkan pengertian aliansi, yaitu:

“Aliansi merupakan perjanjian untuk salingmendukung secara militer jika salah satu negara penandatangan perjanjian diserang olehnegara lain; selain itu aliansi ditujukan untuk memajukan kepentingan bersama di antaranegara anggota. Aliansi dapat bersifat bilateral maupun multilateral, rahasia atau terbuka, sederhana atau sangat terorganisasi, dapat berjangka lama atau pendek, serta dapatdikendalikan untuk mencegah atau memenangkan sebuah perang.”(Plano & Olton, 1999, hal. 137)

Selain itu, Aliansididasarkan pada pengaturan pola kekuasaan, yaitu cara dalam mengatur dan mempergunakan *power*, yang digunakan untuk memaksimalkankelangsungan hidup dan mencapai kepentingan nasional dalam persaingan dengan negaralain. Adapun pola kekuasaan tersebutmencakup respon yang dimiliki oleh suatu negara, manakala *power* negara lainmenunjukkan ancaman potensial terhadap kelangsungan hidup bangsa dan negaradi dalam sistem internasional. Plano & Orton membagi pola kekuasaan menjadi 4,antara lain: (1) militerisme atau upaya untuk meyakini kekuatan sendiri; (2) aliansi atau penyatuan*power* dari sekelompok negara yang diarahkan untuk menghadapi kelompok negara lainnya; (3) keamanan kolektif atau sebuah sistem *power universal* yang dikukuhkan melaluisemboyan “*one for all, all for one*”;(4) *world government* atau sebuah tatanan kerjasama federasi, atau sebuah pemerintahandunia yang didominasi oleh sebuah pemerintahan yang kuat. (Plano & Olton, 1999, hal. 10)

Dalam konstelasi politik di Asia Timur, tindakan peluncuran peluru kendali milik Korea Utara merupakan ancaman yang dianggap serius oleh pihak Jepang maupun Korea Selatan, walaupun Korea Utara beralih mengenai kekuatan militernya hanya digunakan sebagai perlindungan. Dengan adanya ancaman ini, baik Jepang maupun Korea Selatan terdorong untuk melakukan aliansi dan berposisi dengan sumber ancaman tersebut dengan cara menggabungkan kekuatan kedua negara, dengan tujuan agar kedua belah pihak baik Jepang maupun Korea Selatan memiliki lebih banyak *power* dengan adanya aliansi tersebut. Terlebih lagi, dalam perkembangannya, kedua negara juga didorong oleh aktor intrusif agar dapat secepatnya melakukan tindakan untuk menghadapi tindakan Korea Utara. Aktor intrusif tersebut adalah Amerika Serikat, dimana dalam prakteknya, selain mendorong kedua negara untuk secepatnya merespon ancaman yang ada, Amerika juga berjanji akan memberikan dukungan kepada kedua negara dalam menghadapi ancaman tersebut, baik bantuan militer maupun bantuan sebagai mediator atau penengah dalam mengatasi masalah yang dihadapi kedua negara. Selain itu, pilihan oposisi terhadap sumber ancaman dianggap sebagai langkah yang paling tepat agar kedua belah pihak merasa aman, sehingga keseimbangan kekuatan di wilayah Asia Timur dapat terjaga.

#### **4. Hipotesa**

Jepang dan Korea Selatan pada tahun 2015 memperbaiki hubungan luar negerinya dikarenakan oleh dua hal, yaitu :

1. Adanya tindakan peluncuran peluru kendali Korea Utara, dimana tindakan tersebut bagi kedua negara

dianggap dapat mengganggu stabilitas keamanan serta dapat mengancam keberlangsungan hidup dan keselamatan warga negaranya, baik dalam lingkup keamanan di dalam kedua negara maupun di wilayah regional Asia Timur, sehingga kepentingan nasional bagi kedua negara tidak dapat dicapai

2. Adanya dorongan dari *dominant power* yang kuat bagi kedua negara untuk secepatnya memulai proses normalisasi hubungan bilateral kedua negara

## **5. Tujuan Penelitian**

Dalam penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Faktor Pendorong Jepang – Korea Selatan Memperbaiki Hubungan Bilateral Kedua Negara Pasca Peluncuran Rudal Nuklir Korea Utara Tahun 2015” terdapat beberapa tujuan yang hendak dicapai oleh penulis diantaranya yaitu:

1. Menjelaskan dinamika hubungan luar negeri dan sejarah politik antara Jepang dan Korea Selatan
2. Memaparkan mengenai berbagai faktor yang menjadi pertimbangan bagi Jepang dan Korea Selatan dalam merumuskan kebijakan luar negerinya

## **6. Jangkauan Penelitian**

Penelitian ini akan membicarakan mengenai berbagai faktor yang berkaitan dengan membaiknya hubungan luar negeri Jepang – Korea Selatan, serta memaparkan mengenai berbagai aktor yang terlibat dalam dinamika hubungan luar negeri kedua negara tersebut. Dengan

berpedoman pada pemaparan tersebut, maka dapat diperoleh analisis mengapa hubungan kedua negara tersebut dapat membaik. Penelitian ini diawali dengan rasa ketertarikan dan penasaran penulis terhadap hubungan bilateral antara Jepang dan Korea Selatan, yang memiliki dinamika hubungan yang cukup kelam, namun akhirnya pada tahun 2015 - tahun 2016, hubungan kedua negara benar-benar membaik.

## **7. Metode Analisis Dan Pengumpulan Data**

### **1. Metode Pengumpulan Data**

Penulisan karya ilmiah ini menggunakan metode pengumpulan data sekunder, menggunakan sumber yang bersifat kepustakaan (library research), baik versi cetak maupun elektronik. Sumber data tertulis berasal dari literatur, jurnal dan surat kabar. Sedangkan sumber data digital berasal dari jurnal online, berita dan artikel yang valid serta dapat dipertanggungjawabkan.

### **2. Metode Analisis Data**

Penulisan karya ilmiah ini menggunakan metode analisis data Kualitatif, penulis akan memaparkan data yang didapat dalam berbentuk eksplanasi, memaparkan dan membuat relasi serta mengembangkan data sesuai dengan teori yang relevan, kemudian di analisis untuk di ambil sebuah kesimpulan tertentu.

## **8. Sistematika Penulisan**

Skripsi ini terdiri dari 5 bab. Adapun sistematika dari penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

**BAB I :** Berisi tentang pendahuluan yang menjelaskan aturan baku penulisan karya ilmiah, diantaranya; Latar Belakang Masalah yang berisi mengenai gambaran masalah yang dijadikan penelitian; Rumusan Permasalahan yang berisi mengenai permasalahan yang akan dibahas; Kerangka Pemikiran yang berisi mengaitkan landasan teoritik yang digunakan oleh penulis untuk menganalisa permasalahan yang akan dibahas; Hipotesa yang memuat jawaban sementara penulis dalam karya ilmiah yang dibuat; Tujuan Penelitian yang memuat mengenai alasan penulis membuat karya ilmiah; Jangkauan Penelitian yang memuat batasan waktu dari permasalahan yang akan dibahas; Metode Pengumpulan dan Analisis Data yang memuat cara-cara yang digunakan penulis dalam membuat karya ilmiah; serta Sistematika Penulisan yang berisi tentang garis besar isi penulisan.

**BAB II :** Berisi tentang dinamika hubungan bilateral Jepang dan Korea Selatan berupa sejarah hubungan bilateral antara kedua negara beserta pemaparan mengenai konflik yang terjadi antara kedua negara serta langkah-langkah yang ditempuh keduanya untuk mencapai normalisasi hubungan bilateral kedua negara.

**BAB III :** Berisi tentang konstelasi politik di Asia Timur, berupa pertarungan dua ideologi besar dunia di kawasan Asia Timur, serta pemaparan hubungan aliansi dari negara-negara kunci di Asia Timur.

**BAB IV :** Berisi tentang berbagai faktor-faktor penting yang pada akhirnya membuat hubungan bilateral Jepang dan Korea Selatan membaik, seperti yang telah dipaparkan dalam hipotesa.

**BAB V :** Mepaparkan tentang kesimpulan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya dan penanda sebagai akhir penulisan skripsi ini.